



2025

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029.

Laporan kinerja ini merupakan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2025, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pelestarian warisan budaya di Kabupaten Tasikmalaya.

Singaparna, Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya

EDI RUSWANDI HIDAYATULLOH, S.Pd.,MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19720602 200212 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
1. Kata Pengantar	i
2. Daftar Isi	ii
3. Daftar Tabel.....	iii
4. Daftar Gambar	iv
5. Daftar Diagram.....	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi.....	I-5
B. Struktur Organisasi.....	I-6
C. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana.....	I-9
D. Isu Aktual.....	I-11
E. Sistematika Penyusunan	I-12
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	II-1
A. Rencana Strategis	II-1
B. Perjanjian Kinerja	II-3
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	III-1
A. Capaian Indikator Kinerja Utama	III-1
B. Realisasi Anggaran	III-28
BAB IV PENUTUP.....	IV-1
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sarana dan Prasarana.....	I-10
Tabel 3.1.1	Capaian Kinerja Nilai RB Tahun 2025	III-3
Tabel 3.1.2	Capaian Kinerja Nilai RB Tahun 2023-2025.....	III-4
Tabel 3.1.3	Perbandingan Capaian Kinerja Nilai RB Tahun 2023-2025 dengan Target Renstra.....	III-5
Tabel 3.1.4	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” tahun 2025	III-6
Tabel 3.1.5	Analisis efisiensi anggaran sasaran strategis “Meningkatnya kualitas layanan publik dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah” tahun 2025.....	III-8
Tabel 3.1.6	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya kualitas layanan publik dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah” Tahun 2025	III-9
Tabel 3.2.1	Capaian Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-15 Tahun Tahun 2025	III-12
Tabel 3.2.2	Capaian Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-15 Tahun Tahun 2023-2025	III-12
Tabel 3.2.3	Perbandingan Capaian Angka Partisipasi Sekolah usia 7-15 Tahun Tahun 2023-2025 dengan Target Renstra	III-13
Tabel 3.2.4	Perbandingan Capaian Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-15 Tahun Kabupaten Tasikmalaya dengan Nasional	III-14
Tabel 3.2.5	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya sasaran strategis “Meningkatnya Partisipasi dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat” tahun 2025	III-16
Tabel 3.2.6	Analisis efisiensi anggaran sasaran strategis “Meningkatnya Partisipasi dan Mutu Pendidikan	

	Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat” tahun 2025	III-18
Tabel 3.2.7	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Partisipasi dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat” Tahun 2025	III-19
Tabel 3.3.1	Capaian Persentase Persentase Pelestarian Warisan Budaya Tahun 2025	III-21
Tabel 3.3.2	Capaian Persentase Persentase Pelestarian Warisan Budaya Tahun 2023-2025	III-22
Tabel 3.3.3	Perbandingan Capaian Persentase Pelestarian Warisan Budaya Tahun 2023-2025 dengan Target Renstra.....	III-23
Tabel 3.3.4	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya sasaran strategis “Meningkatnya Pelestarian Situs Dan Cagar Budaya Serta Pengembangan Seni Dan Budaya Daerah” tahun 2025	III-25
Tabel 3.3.5	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya sasaran strategis “Meningkatnya Pelestarian Situs Dan Cagar Budaya Serta Pengembangan Seni Dan Budaya Daerah” dtahun 2025	III-26
Tabel 3.3.6	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya sasaran strategis “Meningkatnya Pelestarian Situs Dan Cagar Budaya Serta Pengembangan Seni Dan Budaya Daerah” tahun 2025	III-27
Tabel 3.1	Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2025	III-19
Tabel 4.1	Rata-rata Capaian Kinerja Tahun 2025	IV-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya.....	I-8
Gambar 1.2	Jumlah Aparatur Sipil Negara.....	I-9
Gambar 2.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025	II-3
Gambar 2.2	Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025	II-4
Gambar 3.1	Nilai Reformasi Birokrasi.....	III-2
Gambar 3.2	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-15 Tahun.....	III-10
Gambar 3.3	Persentase Pelestarian Warisan Budaya	III-20

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1	Capaian Kinerja Nilai RB Tahun 2025	III-3
Diagram 3.2	Capaian Kinerja Angka Partisipasi Sekolah usia 7 - 15 Tahun.....	III-11
Diagram 3.3	Capaian APS Nasional-Kabupaten Tasikmalaya	III-11
Diagram 3.4	Capaian Kinerja Persentase Pelestarian Warisan Budaya.....	III-20

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disepakati dengan Kepala Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Penyusunan LKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Proses penyusunan LKIP dilakukan setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja yang telah dicapai dalam 1 (satu) tahun.

I.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan LKIP diantaranya:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya

I.3 Dasar Hukum

Dasar penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah mengacu pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

A. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1. Kedudukan

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya dipimpin oleh Kepala Dinas.

2. Tugas Pokok

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah bidang pendidikan dan bidang kebudayaan serta tugas pembantuan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan dan kebudayaan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas bidang pendidikan dan kebudayaan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

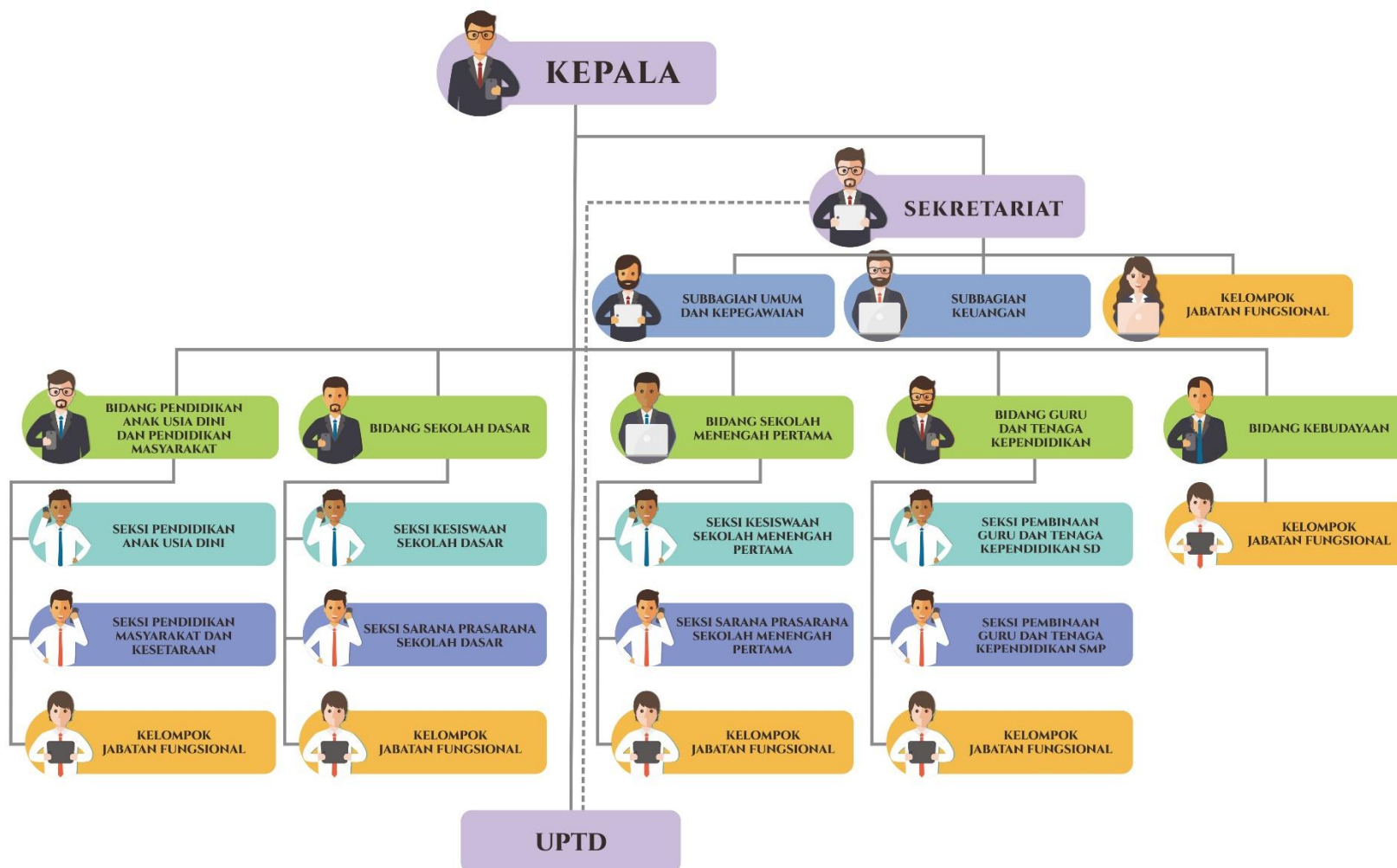
B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 2, sebagai berikut:

1. Kepala
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, terdiri atas:
 - a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kesenian; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Sekolah Dasar, terdiri atas:
 - a. Seksi Kesiswaan Sekolah Dasar;
 - b. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:
 - a. Seksi Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, terdiri atas:
 - a. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
 - b. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;

7. Bidang Kebudayaan, terdiri atas:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional;
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

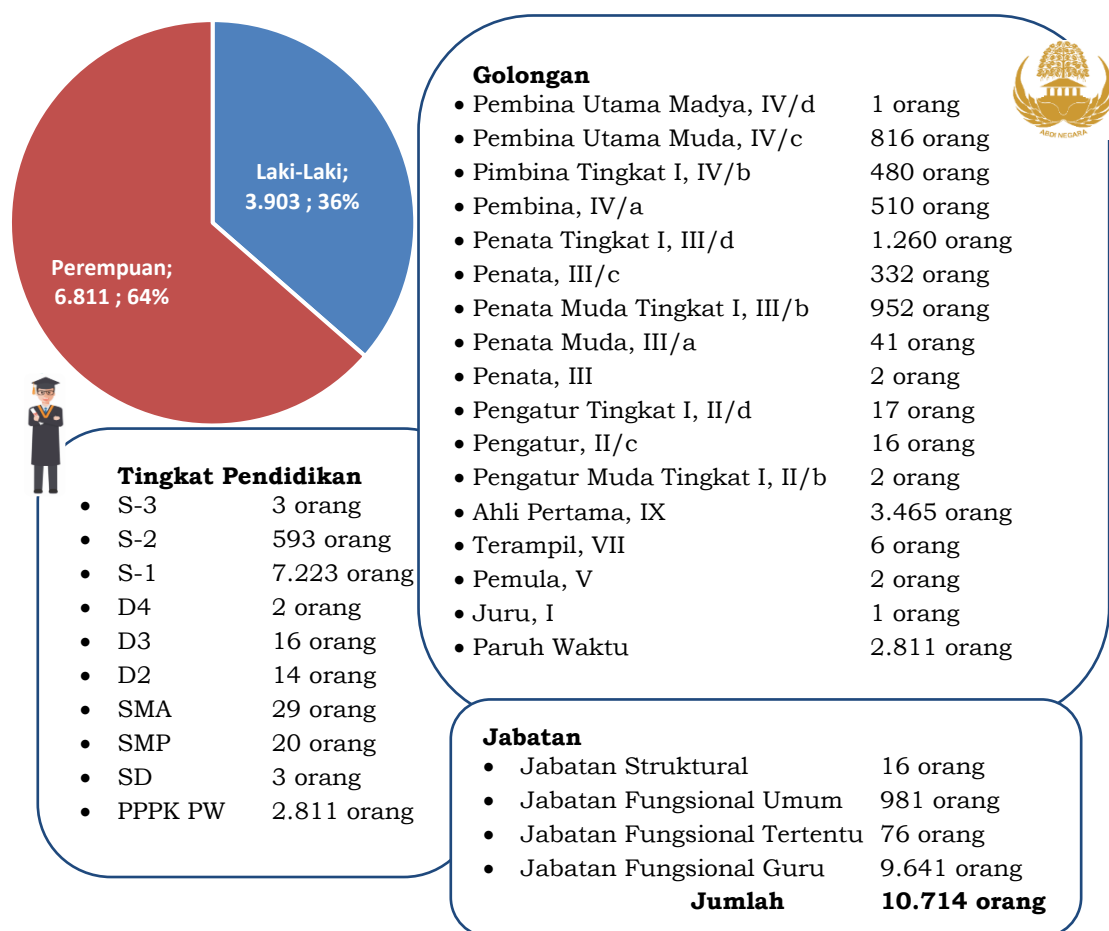
Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya



C. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana

Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi disamping keuangan, material maupun metode. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya memiliki sumber daya manusia periode tahun 2025 sebanyak Orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 1.2
Jumlah Aparatur Sipil Negara



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya ditunjang dengan sarana dan prasarana kerja sebagai berikut:

Tabel 1.1
Sarana dan Prasarana

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
A	SARANA GEDUNG		
1	Tanah	755	M2
2	Gedung Kantor Disdik	74,5	M2
3	Gedung UPTD	39	Unit
4	Gedung TKN	2	Unit
5	Gedung SDN	1.034	Unit
6	Gedung SMPN	137	Unit
7	Gedung SKB	1	Unit
B	SARANA ANGKUTAN		
1	Kendaraan roda empat	13	Unit
2	Kendaraan roda dua	181	Unit
C	SARANA PERKANTORAN		
1	Komputer PC	33	Unit
2	Laptop/Book Note	37	Unit
3	Infocus	2	Unit
4	Kamera	2	Unit
5	Scanner	2	Unit
6	Printer	5	Unit
7	Mesin Penghancur Kertas	2	Unit
D	SARANA PENUNJANG LAINNYA		
1	Jaringan	5	Line
2	Aplikasi Data Pokok Pendidikan	1	Aplikasi
3	Manajemen Aplikasi RKAS	1	Aplikasi
4	Verval DO dan LTM	1	Aplikasi

D. Isu Aktual

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Belum meratanya akses terhadap layanan pendidikan, hal ini ditandai dengan masih belum meratanya pelayanan pendidikan, distribusi pemenuhan guru dan sarana prasarana pada satuan pendidikan;
- b. Masih perlunya meningkatkan mutu layanan pendidikan dengan cara meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan serta penguatan karakter peserta didik; dan
- c. Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pembangunan kebudayaan.

Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) menunjukkan bahwa 70% siswa berusia 15 tahun berada di bawah kompetensi minimum dalam memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Skor PISA ini tidak mengalami peningkatan yang signifikan dalam sepuluh hingga lima belas tahun terakhir. Studi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan besar antarwilayah dan antarkelompok sosial-ekonomi dalam hal kualitas belajar. Hal ini diperparah dengan adanya pandemi COVID-19.

Pada Februari tahun 2022, Kemendikbudristek resmi luncurkan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah metode pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Para pelajar dapat memilih pelajaran apa saja yang ingin dipelajari sesuai passion yang dimilikinya. Secara umum, kurikulum merdeka merupakan kurikulum pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Di mana konten akan lebih optimal

agar peserta didik mempunyai waktu yang cukup untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Nantinya, guru memiliki kekuasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran bisa disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Salah satu tujuan kurikulum merdeka adalah mengejar ketertinggalan pembelajaran yang disebabkan oleh pandemi covid-19. Kurikulum ini dibuat dengan tujuan agar pendidikan di Indonesia bisa seperti di negara maju, yang mana siswa diberi kebebasan dalam memilih apa yang diminatinya dalam pembelajaran.

Pesatnya kemajuan dalam peradaban manusia pastinya akan melahirkan banyak perubahan di setiap aspek kehidupan di masyarakat. Dalam hal masalah budaya, masyarakat menjadi sangat mudah menerima setiap budaya yang masuk tanpa adanya filter atau penyaringan. Dari sini, berbagai permasalahan sosial budaya lainnya bisa muncul dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya agar menyelesaikan permasalahan sosial budaya di daerah.

E. Sistematika Penyusunan

Penulisan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 disusun dengan sistematika mengacu pada Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis

organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 telah ditetapkan arah kebijakan pemenuhan standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan, pemerataan layanan pendidikan dasar, pengintegrasian nilai-nilai keagamaan, kebangsaan, pendidikan karakter, dan kearifan lokal di satuan pendidikan dasar, serta pelestarian seni dan budaya lokal.

Arah kebijakan tersebut menjadi pedoman bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya dalam Menyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 untuk mendukung pencapaian Visi Bupati Tasikmalaya **“TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, MAJU, ADIL, DAN MAKMUR”**, melalui misi ke-satu yaitu: *Mewujudkan manusia yang sehat, cerdas, berakhlak serta berbudaya.*

Dalam mewujudkan misi tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya memiliki peran dalam peningkatan standar mutu pelayanan pendidikan, perlindungan dan pengembangan seni/budaya, yang kemudian dirumuskan menjadi Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat; dan
2. Meningkatkan Pelestarian dan pengembangan seni dan budaya.

Sasaran Strategis yang ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya dalam mendukung pencapaian tujuan di atas adalah:

1. Meningkatnya kualitas layanan publik dan akuntabilitas kinerja PD;
2. Meningkatnya Partisipasi dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat; dan
3. Meningkatnya pelestarian situs dan cagar budaya serta pengembangan seni dan budaya daerah;

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta targetnya per tahun dengan menggunakan SMART-C yaitu *Specific* (spesifik), *Measurable* (dapat diukur), *Agreeable* (dapat disetujui), *Realistic* (realistis), *Time-bounded* (memiliki batas waktu pencapaian), dan *Countinously improved* (dapat disesuaikan dengan perkembangan strategis organisasi). IKU tersebut seluruhnya bersifat outcome yang sangat dipengaruhi oleh pihak eksternal.

IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Tujuan dan Sasaran
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025



B. Perjanjian Kinerja

Dokumen renstra selanjutnya dijabarkan kedalam dokumen perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis, yang kemudian disepakati dalam perjanjian kinerja, antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya dengan Bupati Tasikmalaya.

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja Perangkat Daerah didistribusikan kepada eselon III, eselon IV dan pelaksana secara proporsional

berdasarkan tugas dan fungsinya. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Perjanjian kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja, target yang didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 2.2
Perjanjian Kinerja
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025

Sekretariat

Meningkatnya kualitas layanan publik dan akuntabilitas kinerja PD

IKU 2025: NILAI RB 83,40

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Rp. **956.581.399.088**

Bidang SD, SMP, GTK, PAUD dan DIKMAS

Meningkatnya Partisipasi dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat

IKU 2025: Angka Partisipasi Sekolah usia 7 - 15 Tahun 97,93%

Program Pengelolaan Pendidikan

Rp. **355.727.535.345**

Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Rp. **8.614.438.600**

Bidang Kebudayaan

Meningkatnya pelestarian situs dan cagar budaya serta pengembangan seni dan budaya daerah

IKU 2025: Persentase pelestarian warisan budaya 41,45%

Program Pengembangan Kebudayaan

Rp. **1.626.250.000**

Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Rp. **1.537.400.000**

Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Rp. **144.040.000**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Indikator Kinerja Utama

Pengukuran Kinerja dilaksanakan untuk menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Adapun pengukuran kinerja tersebut, dengan rumusan sebagai berikut:

1. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:

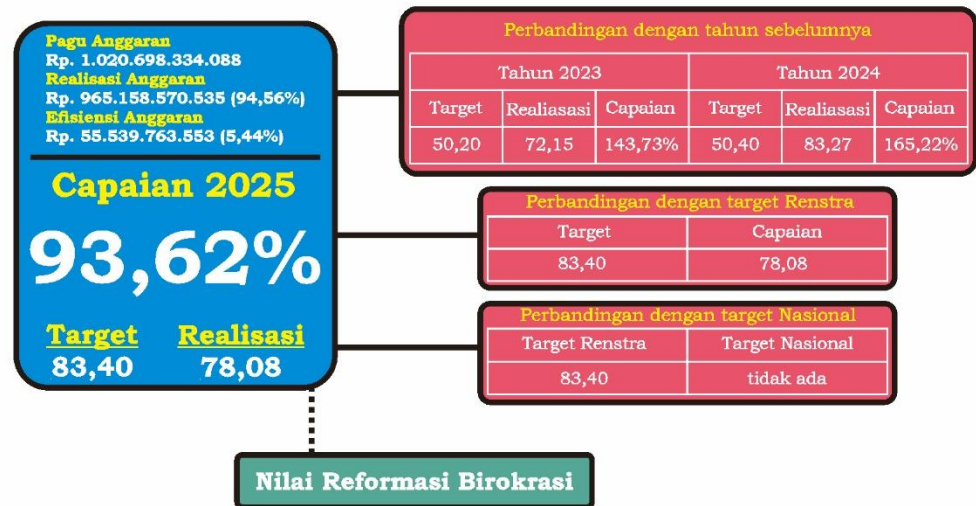
$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin rendah, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya mengukur capaian kinerja Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:

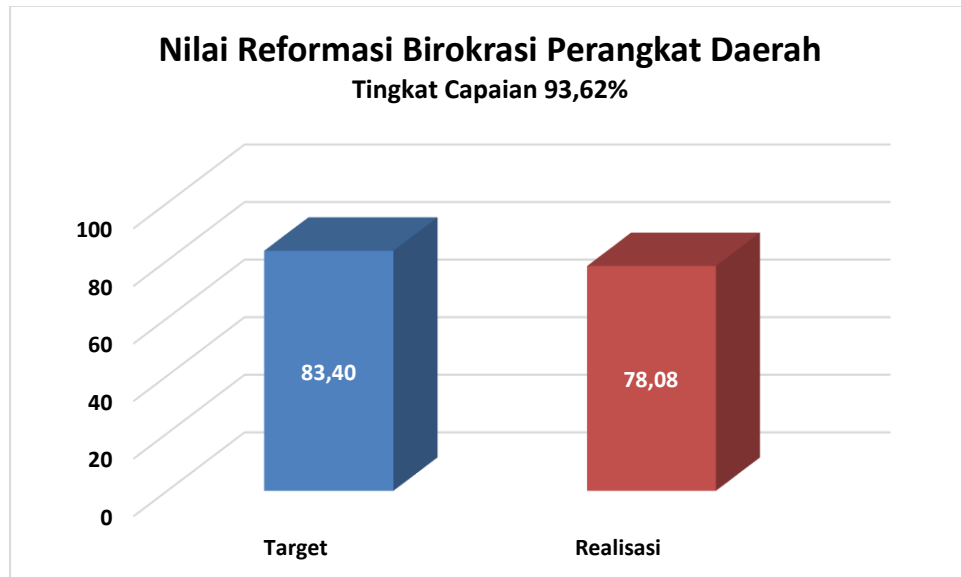
3.1 Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kualitas layanan publik dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah



Gambar 3.1
Nilai Reformasi Birokrasi

Dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan yang efektif dan akuntabel dalam memberikan layanan publik, diukur melalui indikator sasaran **Nilai Reformasi Birokrasi**.

Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 sebesar 78,08 dari target 83,40, sehingga capaiannya sebesar 93,62%.



Sumber Data : Bagian Organisasi SETDA

Diagram 3.1
Capaian Kinerja Nilai RB Tahun 2025

Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 sebesar 78,08 dengan kategori BB (Sangat Baik). Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi.

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.1.1
Capaian Kinerja Nilai RB Tahun 2025

Uraian Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
<i>Meningkatnya kualitas layanan publik dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah</i>			
Nilai RB	83,40	78,08	93,62%

Berdasarkan tabel diatas, target yang ditetapkan untuk nilai RB adalah 83,40. Realisasi yang berhasil dicapai adalah

78,08. Dengan demikian, tingkat capaian mencapai 93,62%, menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi telah berjalan sangat baik dan hampir sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025

Tabel 3.1.2
Capaian Kinerja Nilai RB Tahun 2023-2025

Uraian Indikator Sasaran	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
<i>Meningkatnya kualitas layanan publik dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah</i>			
Nilai RB	72,15	83,27	78,08

Berdasarkan tabel diatas, indikator sasaran Nilai RB setiap tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan, kecuali di tahun 2025 capaiannya menurun menjadi 78,08, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan konsistensi peningkatan kualitas layanan dan akuntabilitas. Secara keseluruhan, tren capaian menunjukkan adanya lonjakan positif di 2024, tetapi perlu perhatian khusus agar penurunan di 2025 tidak berlanjut dan kualitas layanan publik tetap terjaga secara berkelanjutan.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025 dengan Target Renstra

Tabel 3.1.3
Perbandingan Capaian Kinerja Nilai RB Tahun 2023-2025 dengan Target Renstra

Uraian Indikator Sasaran	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
	Target Renstra	Realisasi	Capaian	Target Renstra	Realisasi	Capaian	Target Renstra	Realisasi	Capaian
<i>Meningkatnya kualitas layanan publik dan akuntabilitas kinerja PD</i>									
Nilai RB	50,20	72,15	143,73%	50,40	83,27	165,22%	83,40	78,08	93,62%

Berdasarkan tabel diatas, hampir semua indikator sasaran Nilai Reformasi Birokrasi (RB) sebagai bagian dari sasaran strategis meningkatnya kualitas layanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk realisasi setiap tahunnya melebihi target Renstra, kecuali pada tahun 2025 dengan target yang ditetapkan lebih tinggi, yaitu 83,40, namun realisasi hanya mencapai 78,08. Capaian turun menjadi 93,62%, menunjukkan adanya penurunan dibanding tahun sebelumnya, serta tantangan dalam menjaga konsistensi kinerja. Secara keseluruhan, tren capaian memperlihatkan lonjakan positif pada 2023 dan 2024, tetapi terjadi penurunan di 2025. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi penguatan agar target yang lebih ambisius dapat tercapai dan kualitas layanan publik tetap meningkat secara berkelanjutan.

3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi Alternatif yang telah Dilakukan

Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 sebesar 78,08 dari target 83,40, sehingga capaiannya sebesar 99,84%.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya memperoleh capaian sebesar 78,08 pada tahun 2025 dengan kategori BB (Sangat Baik). Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi. Namun belum memberikan dampak signifikan terhadap penyelesaian permasalahan di masyarakat/stakeholders, oleh karena itu masih perlu adanya perbaikan dan komitmen bersama dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

3.1.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya untuk sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Dan Akuntabilitas Kinerja PD” sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp. 1.020.698.334.088,00 yang bersumber dari DAK, Bantuan Provinsi dan APBD Kabupaten Tasikmalaya, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 965.158.570.535,00 (94,56%).

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.4
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	(%)	Efisiensi %
Meningkatnya kualitas layanan publik dan akuntabilitas kinerja PD	1.020.698.334.088	965.158.570.535	94,56	5,44

Jika kita bandingkan realisasi anggaran dengan capaian indikator kinerja utama sasaran strategis “Meningkatnya kualitas layanan publik dan akuntabilitas kinerja PD”, maka belum menunjukkan efisiensi, karena meskipun realisasi lebih kecil dari pagu, namun capaian belum mencapai 100% , yaitu 93,62%.

Tabel 3.1.5

Analisis efisiensi anggaran sasaran strategis “Meningkatnya kualitas layanan publik dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah” tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	CAPAIAN	%	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	EFISIENSI (%)
Meningkatnya kualitas layanan publik dan akuntabilitas kinerja PD	Nilai RB	83,40	78,08	93,62%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.020.698.334.088	965.158.570.535	94,56%	5,44%
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	381.287.500	372.845.400	97,79%	2,21%
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.015.545.421.056	960.276.164.124	94,56%	5,44%
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	350.000.000	342.695.000	97,91%	2,09%
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150.000.000	135.615.000	90,41%	9,59%
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.875.225.532	1.830.844.573	97,63%	2,37%
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	647.930.000	644.874.310	99,53%	0,47%
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	673.480.000	635.366.732	94,34%	5,66%
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.074.990.000	920.165.396	85,60%	14,40%

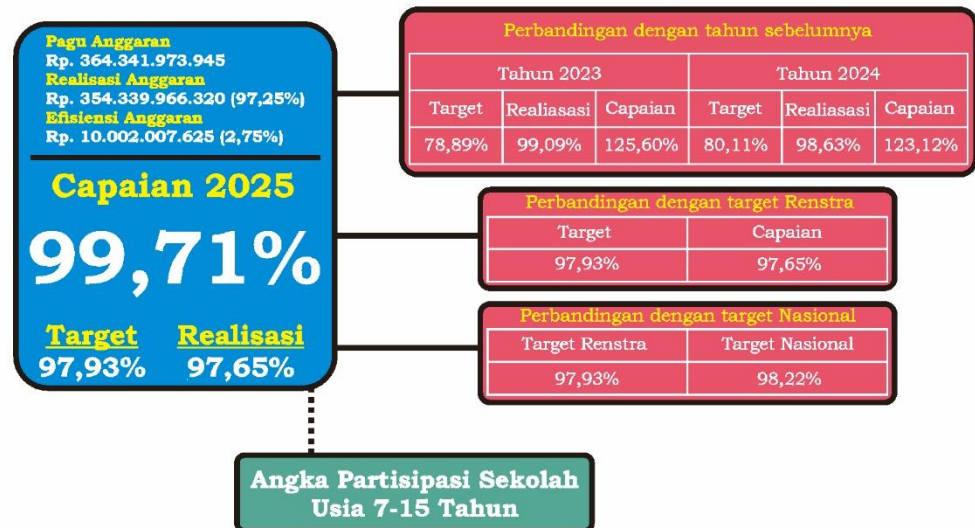
3.1.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.1.6

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya kualitas layanan publik dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah” Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	CAPAIAN	%	PROGRAM/KEGIATAN	URAIAN/PENJELASAN
Meningkatnya kualitas layanan publik dan akuntabilitas kinerja PD	Nilai RB	83,40	78,08	93,62%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan ini mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan ini mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kegiatan ini mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan ini mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan ini mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan ini mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan ini mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan ini mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah

3.2 Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Partisipasi dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat



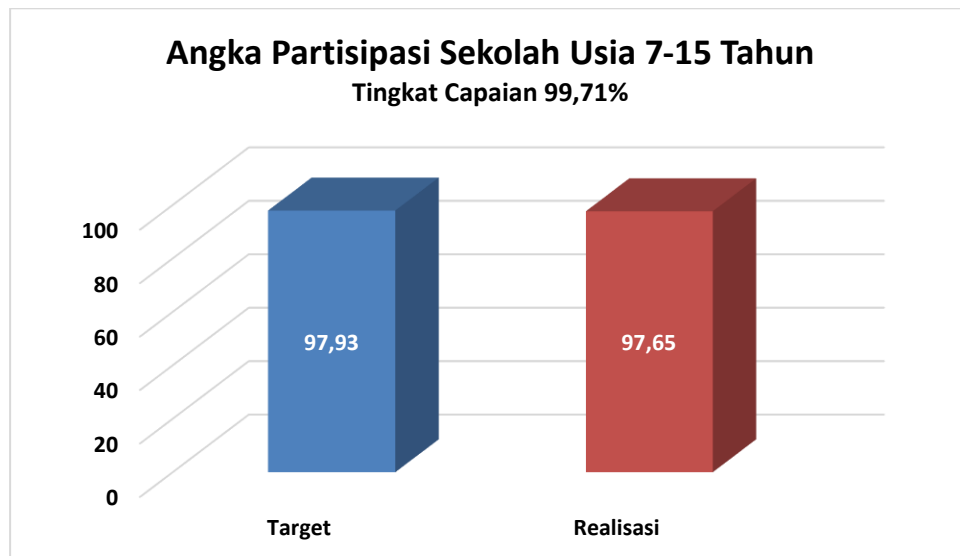
Gambar 3.2

Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-15 Tahun

Peningkatan partisipasi dan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan masyarakat diukur melalui indikator sasaran Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7 - 15 Tahun. Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.

Berdasarkan Rapor Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi per Bulan Juli Tahun 2025, diperoleh realisasi APS usia 7 - 15 Tahun Kabupaten Tasikmalaya sebesar 97,65%, dari target sebesar 97,93%,

sehingga capaian indikator kinerja sebesar 99,71%, berikut kami sampaikan dalam bentuk diagram.

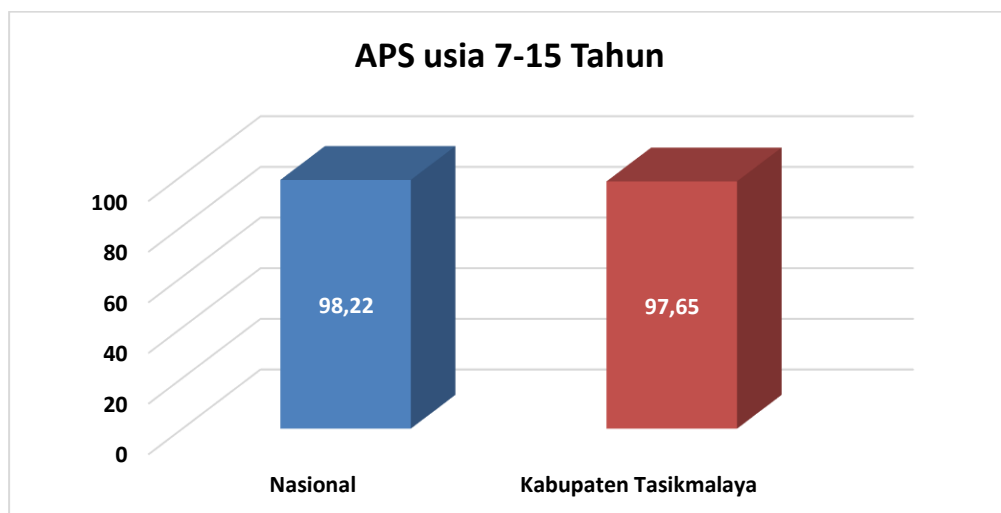


Sumber Data : Rapor Pendidikan Juli 2025

Diagram 3.2

Capaian Kinerja Angka Partisipasi Sekolah usia 7-15 Tahun

Secara nasional, APS mencapai 98,22%, sementara itu, APS di Kabupaten Tasikmalaya berada sedikit di bawah angka nasional, yaitu 97,65% menghasilkan selisih sebesar 0,57%, sebagaimana dapat dilihat pada diagram di bawah.



Sumber Data : Rapor Pendidikan Tahun 2025

Diagram 3.3

Capaian Angka Partisipasi Sekolah Nasional-Kabupaten Tasikmalaya

3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.2.1
Capaian Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-15 Tahun Tahun 2025

Uraian Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
<i>Meningkatnya Partisipasi dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat</i>			
Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-15 Tahun	97,93%	97,65%	99,71%

Berdasarkan tabel diatas, indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk anak usia 7–15 tahun menunjukkan pencapaian yang sangat baik. Target APS yang ditetapkan adalah 97,93%. Realisasi capaian APS mencapai 97,65%, sedikit di bawah target namun tetap menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi. Persentase capaian terhadap target tercatat sebesar 99,71%, mencerminkan efektivitas program pendidikan dan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong akses pendidikan dasar yang merata.

3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025

Tabel 3.2.2
Capaian Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-15 Tahun Tahun 2023-2025

Uraian Indikator Sasaran	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
<i>Meningkatnya Partisipasi dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat</i>			
Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-15 Tahun	99,09%	98,63%	97,65%

Berdasarkan tabel di atas, indikator capaian APS (Angka Partisipasi Sekolah) usia 7–15 tahun menunjukkan tren penurunan selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023, capaian APS berada di angka 99,09%, mencerminkan hampir

seluruh anak usia sekolah telah mengakses pendidikan. Namun, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 98,63%, dan kembali menurun di tahun 2025 menjadi 97,65%.

Penurunan ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi sekolah, seperti aksesibilitas, kualitas pendidikan, dan dukungan sosial ekonomi. Meskipun angka tersebut masih tergolong tinggi, tren penurunan ini menandakan perlunya intervensi strategis agar target peningkatan kualitas layanan publik tetap tercapai secara berkelanjutan.

3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025

Tabel 3.2.3
Perbandingan Capaian Angka Partisipasi Sekolah usia 7-15 Tahun Tahun 2023-2025 dengan Target Renstra

Uraian Indikator Sasaran	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
	Target Renstra	Realisasi	Capaian	Target Renstra	Realisasi	Capaian	Target Renstra	Realisasi	Capaian
<i>Meningkatnya Partisipasi dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat</i>									
APS 7-15 Tahun	78,89%	99,09%	125,60%	80,11%	98,63%	123,12%	97,93%	97,65%	99,71%

Berdasarkan tabel di atas, indikator APS (Angka Partisipasi Sekolah) untuk kelompok usia 7–15 tahun menunjukkan dinamika capaian selama tiga tahun terakhir. Tahun 2023, target Renstra ditetapkan sebesar 78,89%, namun realisasi mencapai 99,09%, menghasilkan capaian sebesar 125,60%. Ini menunjukkan bahwa partisipasi sekolah melampaui target. Tahun 2024, target dinaikkan menjadi 80,11%, dengan realisasi sedikit menurun ke 98,63%, menghasilkan capaian 123,12%. Meskipun terjadi penurunan, capaian tetap di atas target.

Tahun 2025, target Renstra naik ke 97,93%, mendekati angka realisasi yang tercatat 97,65%, sehingga capaian berada di angka 99,71%. Ini menunjukkan bahwa target semakin realistis dan mendekati kondisi aktual partisipasi pendidikan.

Selama tiga tahun berturut-turut, capaian APS menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendorong akses pendidikan dasar yang inklusif dan berkualitas. Penyesuaian target Renstra yang semakin mendekati realisasi mencerminkan perencanaan yang lebih akurat dan responsif terhadap kondisi lapangan.

3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-15 Tahun Kabupaten Tasikmalaya dengan Nasional

Tabel 3.2.4
Perbandingan Capaian Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-15 Tahun

Kabupaten Tasikmalaya dengan Nasional

Uraian Indikator Sasaran	Kabupaten Tasikmalaya	Nasional
Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-15 Tahun	97,65%	98,22%

Secara nasional, APS mencapai 98,22%, sementara itu, APS di Kabupaten Tasikmalaya berada sedikit di bawah angka nasional, yaitu 97,65% menghasilkan selisih sebesar 0,57%.

3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi Alternatif yang telah Dilakukan

Peningkatan partisipasi dan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan masyarakat diukur melalui indikator sasaran Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7 - 15 Tahun. Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah

perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah

Berdasarkan Rapor Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2025, diperoleh realisasi APS usia 7 - 15 Tahun Kabupaten Tasikmalaya sebesar 97,65%, dari target sebesar 97,93%, sehingga capaian indikator kinerja sebesar 99,71%.

Angka Partisipasi Sekolah dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu:

- a. Faktor pendidikan orang dewasa (melek huruf);
- b. Faktor ekonomi (pengeluaran untuk pendidikan);
- c. Faktor guru (rasio murid terhadap guru); dan
- d. Faktor jumlah sekolah (rasio murid terhadap sekolah).

Oleh karena itu, untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya terus melakukan upaya, antara lain :

- a. Meningkatkan koordinasi dengan pihak desa, kecamatan dan perangkat daerah lain yang terkait untuk penanganan anak tidak sekolah atau anak berpotensi putus sekolah;
- b. Peningkatan kompetensi Pendidikan dan Tenaga Pendidikan melalui kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, serta Workshop
- c. Peningkatan kualitas sarana prasarana Pendidikan, melalui kegiatan Rehabilitasi atau Pembangunan.
- d. Pemberian bantuan perlengkapan sekolah untuk peserta didik
- e. Inovasi layanan pendidikan berbasis teknologi informatika, yaitu melalui Platform Merdeka Mengajar

- f. Rintisan fasilitasi layanan pendidikan inklusif, yaitu dengan dibentuknya Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan
- g. Pengintegrasian nilai-nilai keagamaan, kebangsaan, pendidikan karakter, dan kearifan lokal di satuan pendidikan dasar, melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)

Untuk mengoptimalkan pencapaian angka partisipasi sekolah pada tahun yang akan datang, perlu upaya yang lebih dalam penanganan Anak Tidak Sekolah, diantaranya dengan meningkatkan koordinasi Tim Penanganan Anak Tidak Sekolah Tingkat Kabupaten yang sudah dibentuk.

3.2.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya untuk sasaran strategis “Meningkatnya Partisipasi dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat” sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp. 364.341.973.945,00 yang bersumber dari DAK, Bantuan Provinsi dan APBD Kabupaten Tasikmalaya, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 354.339.966.320,00 (97,25%).

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.5

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya sasaran strategis “Meningkatnya Partisipasi dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat” tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	(%)	Efisiensi %
Meningkatnya partisipasi dan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan masyarakat	364.341.973.945	354.339.966.320	97,25	2,75

Jika kita bandingkan realisasi anggaran dengan capaian indikator kinerja utama sasaran strategis “Meningkatnya partisipasi dan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan masyarakat”, maka belum menunjukkan efisiensi, karena meskipun realisasi lebih kecil dari pagu, namun capaian belum mencapai 100%, yaitu 99,71%.

Tabel 3.2.6
Analisis efisiensi anggaran sasaran strategis
“Meningkatnya Partisipasi dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat” tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	CAPAIAN	%	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	EFISIENSI
Meningkatnya Partisipasi dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat	APS 7-15 Tahun	97,93	97,65	99,71%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAN PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	364.341.973.945	354.339.966.320	97,25	2,75
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	355.727.535.345	345.844.408.020	97,22	2,78
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar,	190.932.179.045	181.572.792.226	95,10	4,90
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	88.170.310.500	88.013.316.485	99,82	0,18
					Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	66.899.335.800	66.587.019.859	99,53	0,47
					Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	9.725.710.000	9.671.279.450	99,44	0,56
					PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	8.614.438.600	8.495.558.300	98,62	1,38
					Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	8.614.438.600	8.495.558.300	98,62	1,38

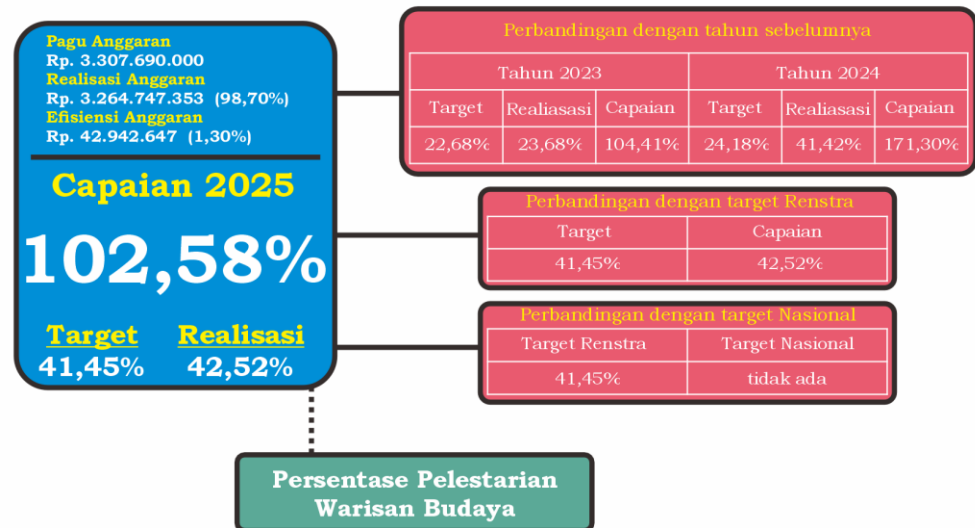
3.2.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.2.7

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Partisipasi dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat” Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	CAPAIAN	%	PROGRAM/KEGIATAN	URAIAN/PENJELASAN
Meningkatnya Partisipasi dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat	APS 7-15 Tahun	97,93	97,65	99,71%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar,	Kegiatan ini mendukung peningkatan partisipasi dan Mutu Pendidikan dasar
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kegiatan ini mendukung peningkatan partisipasi dan Mutu Pendidikan dasar
					Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kegiatan ini mendukung peningkatan partisipasi dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini
					Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kegiatan ini mendukung peningkatan partisipasi dan Mutu Pendidikan Masyarakat
					PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
					Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kegiatan ini mendukung peningkatan partisipasi dan Mutu Pendidikan Dasar, Anak Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat

3.3 Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Pelestarian Situs dan Cagar Budaya serta Pengembangan Seni dan Budaya Daerah



Gambar 3.3

Persentase Pelestarian Warisan Budaya

Untuk meningkatkan pelestarian situs dan cagar budaya serta pengembangan seni dan budaya daerah, keberhasilan diukur melalui indikator sasaran persentase pelestarian warisan budaya, dengan capaian kinerja sebagai berikut:

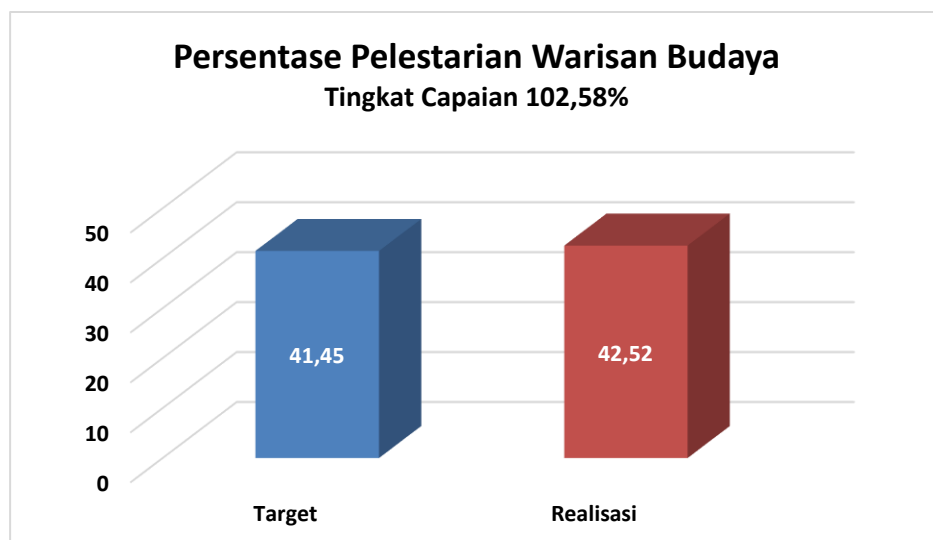


Diagram 3.4

Capaian Persentase Pelestarian Warisan Budaya Tahun 2025

Berdasarkan diagram diatas, ditunjukkan bahwa pada tahun 2025, persentase pelestarian warisan budaya ditargetkan sebesar 41,45% sedangkan realisasinya sebesar 42,52%, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 102,58%. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya untuk melestarikan warisan budaya adalah :

1. Inventarasi objek pemajuan kebudayaan melalui tahapan pencatatan dan pendokumentasian pada Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu;
2. Mengadakan Workshop, festival seni dan budaya;
3. Memberikan pembinaan dan bantuan bagi lembaga kesenian; dan
4. Mengenalkan kebudayaan kepada para peserta didik melalui menggunakan pakaian adat setiap hari selasa dan kegiatan ekstrakurikuler olah raga tradisonal.

3.3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.3.1
Capaian Persentase Persentase Pelestarian Warisan Budaya Tahun 2025

Uraian Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
<i>Meningkatnya pelestarian situs dan cagar budaya serta pengembangan seni dan budaya daerah</i>			
Persentase pelestarian warisan budaya	41,45%	42,52%	102,58%

Berdasarkan tabel diatas, target yang ditetapkan untuk persentase pelestarian warisan budaya adalah 41,45%. Realisasi yang berhasil dicapai adalah 42,52%. Dengan demikian, tingkat capaian mencapai 102,58%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelestarian warisan budaya

telah berjalan dengan sangat baik dan melampaui target yang telah ditetapkan.

3.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025

Tabel 3.3.2
Capaian Persentase Persentase Pelestarian Warisan Budaya Tahun 2023-2025

Uraian Indikator Sasaran	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
<i>Meningkatnya pelestarian situs dan cagar budaya serta pengembangan seni dan budaya daerah</i>			
Persentase pelestarian warisan budaya	35,82%	41,42%	42,52%

Berdasarkan tabel diatas, Selama periode tiga tahun terakhir, upaya pelestarian warisan budaya menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Indikator utama yang digunakan adalah persentase pelestarian warisan budaya, yang mencerminkan keberhasilan dalam menjaga situs dan cagar budaya serta mengembangkan seni dan budaya daerah.

Secara keseluruhan, data ini mencerminkan komitmen berkelanjutan dalam menjaga kekayaan budaya bangsa. Peningkatan capaian dari tahun ke tahun menjadi bukti bahwa pelestarian warisan budaya mendapat perhatian serius dan menjadi bagian integral dari pembangunan kebudayaan nasional.

3.3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025 dengan Target Renstra

Tabel 3.3.3
Perbandingan Capaian Persentase Pelestarian Warisan Budaya Tahun 2023-2025
dengan Target Renstra

Uraian Indikator Sasaran	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
	Target Renstra	Realisasi	Capaian	Target Renstra	Realisasi	Capaian	Target Renstra	Realisasi	Capaian
<i>Meningkatnya pelestarian situs dan cagar budaya serta pengembangan seni dan budaya daerah</i>									
Persentase pelestarian warisan budaya	22,68%	23,68 %	104,41%	24,18%	41,42%	171,30%	41,45%	42,52%	102,58%

Berdasarkan tabel diatas, selama periode 2023 hingga 2025, upaya pelestarian warisan budaya menunjukkan tren capaian yang sangat positif dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Indikator yang digunakan adalah persentase pelestarian warisan budaya, yang mencakup pelestarian situs dan cagar budaya serta pengembangan seni dan budaya daerah. Secara keseluruhan, capaian selama tiga tahun berturut-turut menunjukkan bahwa program pelestarian warisan budaya tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menjadi indikator keberhasilan strategi pelestarian yang diterapkan, sekaligus memperkuat komitmen terhadap pelestarian nilai-nilai budaya lokal.

3.3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi Alternatif yang telah Dilakukan

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Tasikmalaya untuk melestarikan warisan budaya adalah :

- a. Inventariasi objek pemajuan kebudayaan melalui tahapan pencatatan dan pendokumentasian pada Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu;
- b. Memberikan pembinaan dan bantuan bagi lembaga kesenian;
- c. Mengenalkan kebudayaan kepada para peserta didik melalui menggunakan pakaian adat setiap hari selasa dan kegiatan ekstrakurikuler olah raga tradisonal;
- d. Membentuk Tim Ahli Cagar Budaya;
- e. Telah ditetapkan Cagar Budaya Mesjid Agung Manonjaya;
- f. Telah ditetapkan Warisan Budaya Tak benda Tingkat Nasional (Terebang Gebes dan Hajat Sasih Kampung Naga);
- g. Telah ditetapkan Cagar Budaya Struktur Rumah Ibu Ijum Kampung Naga;
- h. Telah ditetapkan Cagar Budaya Makam Syekh Abdul Muhyi Pamijahan;
- i. Pemanfaatan Pusat Budaya Pagerageung sebagai pusat pengembangan, pelestarian, dan riset hingga pendidikan budaya; dan
- j. Penyelenggaraan tradisi budaya, workshop, serta festival seni dan budaya.

3.3.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya untuk sasaran strategis “Meningkatnya Pelestarian Situs Dan Cagar Budaya Serta Pengembangan Seni Dan Budaya Daerah” sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp. 3.307.690.000,00 yang bersumber dari DAK, Bantuan Provinsi dan APBD

Kabupaten Tasikmalaya, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.264.747.353,00 (98,70%).

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.4
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya sasaran strategis “Meningkatnya Pelestarian
Situs Dan Cagar Budaya Serta Pengembangan Seni Dan Budaya Daerah”
tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	(%)	Efisiensi %
Meningkatnya pelestarian situs dan cagar budaya serta pengembangan seni dan budaya daerah	3.307.690.000	3.264.747.353	98,70	1,30

Jika kita bandingkan realisasi anggaran dengan capaian indikator kinerja utama sasaran strategis “Meningkatnya pelestarian situs dan cagar budaya serta pengembangan seni dan budaya daerah”, maka sudah menunjukkan efisiensi, karena realisasi lebih kecil dari pagu, dan capaian mencapai lebih dari 100%, yaitu 102,58%.

Tabel 3.3.5

Analisis efisiensi anggaran sasaran strategis “Meningkatnya pelestarian situs dan cagar budaya serta pengembangan seni dan budaya daerah” tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	CAPAIAN	%	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	EFISIENSI
Meningkatnya pelestarian situs dan cagar budaya serta pengembangan seni dan budaya daerah	Persentase Pestaarian Warisan Budaya	41,45	42,52	102,58%	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	3.307.690.000	3.264.747.353	98,70	1,30
					PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.626.250.000	1.613.522.450	99,22	0,78
					Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	471.250.000	460.931.750	97,81	2,19
					Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.155.000.000	1.152.590.700	99,79	0,21
					PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.537.400.000	1.511.634.903	98,32	1,68
					Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.537.400.000	1.511.634.903	98,32	1,68
					PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	144.040.000	139.590.000	96,91	3,09
					Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	144.040.000	139.590.000	96,91	3,09

Tabel 3.3.6

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya pelestarian situs dan cagar budaya serta pengembangan seni dan budaya daerah” Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	CAPAIAN	%	PROGRAM/KEGIATAN	URAIAN/PENJELASAN
Meningkatnya pelestarian situs dan cagar budaya serta pengembangan seni dan budaya daerah	Persentase Pestaarian Warisan Budaya	41,45	42,52	102,58%	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	
					PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
					Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan ini mendukung upaya pengembangan budaya daerah
					Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan ini mendukung upaya pengembangan budaya daerah
					PROGRAM PENGEMBANGAN KESANIAN TRADISIONAL	
					Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan ini mendukung upaya pengembangan seni daerah
					PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
					Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kegiatan ini mendukung upaya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya daerah

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp. 1.385.040.308.033,00 yang bersumber dari DAK, Bantuan Provinsi dan APBD Kabupaten Tasikmalaya, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. Rp. 1.319.498.536.855,00 (95,27%).

Realisasi anggaran per sasaran strategis pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2025

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Meningkatnya kualitas layanan publik dan akuntabilitas kinerja PD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.020.698.334.088	965.158.570.535	94,56%
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	381.287.500	372.845.400	97,79%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.015.545.421.056	960.276.164.124	94,56%
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	350.000.000	342.695.000	97,91%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150.000.000	135.615.000	90,41%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.875.225.532	1.830.844.573	97,63%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	647.930.000	644.874.310	99,53%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	673.480.000	635.366.732	94,34%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.074.990.000	920.165.396	85,60%
2	Meningkatnya Partisipasi dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini,	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	355.727.535.345	345.844.408.020	97,22
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar,	190.932.179.045	181.572.792.226	95,10
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	88.170.310.500	88.013.316.485	99,82

	Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	66.899.335.800	66.587.019.859	99,53
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	9.725.710.000	9.671.279.450	99,44
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	8.614.438.600	8.495.558.300	98,62
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	8.614.438.600	8.495.558.300	98,62
3	Meningkatnya pelestarian situs dan cagar budaya serta pengembangan seni dan budaya daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.626.250.000	1.613.522.450	99,22
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	471.250.000	460.931.750	97,81
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.155.000.000	1.152.590.700	99,79
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.537.400.000	1.511.634.903	98,32
		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.537.400.000	1.511.634.903	98,32
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	144.040.000	139.590.000	96,91
		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	144.040.000	139.590.000	96,91

BAB IV PENUTUP

Laporan kinerja adalah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja ini menggambarkan pengukuran kinerja dan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya yang telah dicapai.

Pada Tahun 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya telah melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja dengan capaian sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Rata-Rata Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Uraian Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
	S1. Meningkatnya kualitas layanan publik dan akuntabilitas kinerja PD				
	Nilai RB	83,40	78,08	93,62%	Sangat Baik
	S2. Meningkatnya Partisipasi dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat				
	APS 7-15 Tahun	97,93%	97,65%	99,71%	Sangat Baik
	S3. Meningkatnya pelestarian situs dan cagar budaya serta pengembangan seni dan budaya daerah				
	persentase pelestarian warisan budaya	41,45%	42,52%	102,58%	Sangat Baik
Rata-Rata Capaian				98,64%	Sangat Baik

Masih banyak tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya dalam meningkatkan standar mutu pelayanan Pendidikan, terutama implementasi kurikulum merdeka untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, dan menjaga warisan budaya yang semakin digusur budaya asing.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dituntut untuk melakukan inovasi-inovasi untuk mengatasi permasalahan pendidikan dan kebudayaan dengan segala keterbatasan yang ada, agar siap menghadapi tantangan global di era revolusi industry 4.0.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JLN. DALEM WIRAWANGSA KM. 1,2 MANGUNREJA KAB. TASIKMALAYA